

Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru

Occi Mardila Purwanti

Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5,
Simpang Baru, Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
Email: occi.mardila0411@student.unri.ac.id

Sujianto

Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5,
Simpang Baru, Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
Email : fisip_suji@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlambatan pencairan dana, masih kurangnya kinerja dari para pelaksana serta sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemetansi kegiatan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones dalam Siti Erna (2009) dengan tiga indikator yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan rehabilitasi rumah layak huni belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kesalah pahaman antar pihak karena kurangnya koordinasi, kinerja para pelaksana masih belum optimal, kurangnya sosialisasi dan adanya keterlambatan pencairan dana, serta pembangunan melebihi target waktu. Saran dari penelitian ini yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak dan menjalankan tugasnya dengan baik, perlu diadakan sosialisasi kembali, adanya tambahan dana serta pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Rumah Layak Huni.

Abstract. *This research is motivated by the delay in fund disbursement, the lack of performance of the implementers and socialization to the community is still not optimal. This research aims to find out the implementation of livable house rehabilitation activities in Pekanbaru City. This research uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques of observation, interviews and documentation. This research uses the theory of Charles O. Jones in Siti Erna (2009) with three indicators, namely: organization, interpretation and application. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of livable house rehabilitation activities has not run optimally. This is because there are still misunderstandings between parties due to lack of coordination, the performance of the implementers is still not optimal, lack of socialization and delays in disbursement of funds, and development exceeds the target time. Suggestions from this study are to improve coordination and cooperation between parties and carry out their duties properly, need to hold socialization again, additional funds and construction can be completed on time.*

Keywords: Implementation, Programs, Livable Houses.

1. PENDAHULUAN

Penduduk miskin di Kota Pekanbaru setiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan 31,62 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 28,60 ribu jiwa. Terjadinya flutuasi disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan rata-rata penduduk. Di Kota Pekanbaru angka kemiskinan dapat ditekan jika pemerintah dalam menjalankan perannya secara optimal dalam menaikkan tingkat ekonomi disejumlah sektor dimana dalam hal ini menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Turunnya jumlah penduduk miskin di tahun 2019 tidak hanya terjadi dipekanbaru melainkan beberapa daerah diprovinsi Riau termasuk Pekanbaru. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu tingkat pengangguran terbuka di Pekanbaru tahun 2019 mengalami penurunan. Selanjutnya, pada periode September 2018-September 2019 tercatat inflasi umum di Provinsi Riau cukup rendah. Serta pada periode yang sama harga eceran beberapa dari komoditas pokok mengalami penurunan. Sehingga adanya korelasi pengangguran dan kemiskinan positif karena pertumbuhan ekonominya juga naik.

Hak pemenuhan atas rumah merupakan unsur penting yang harus diperhatikan. Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang dibangun tanpa memperhatikan atau mengetahui kriteria fisik rumah yang dikatakan layak huni. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut membuat program yaitu bantuan berupa rumah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dimana akan dilaksanakan disetiap daerah di Indonesia.

Sejak tahun 2012 Kota Pekanbaru dalam pencapaian visi dan misi dan juga dalam penanggulangan kemiskinan telah menetapkan Program Rumah Layak Huni oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bantuan keuangan khusus Provinsi Riau untuk rumah tidak layak huni merupakan dukungan pemerintah provinsi kepada masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota pada dinas teknis terkait. Program ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin/pra sejahtera akibat resiko sosial yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomen alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan keuangan khusus ditujukan untuk program rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni merupakan dukungan dari Pemerintah Provinsi yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dimana melalui program perumahan dan kawasan permukiman dan / atau program pengembangan perumahan pengusulan dana bantuan keuangan dari kab/kota yang disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala bappeda Provinsi oleh Bupati/Walikota. Pengusulan dana dilakukan dengan membuat permohonan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen Rencana Kerja Kegiatan (RKK). Untuk tembusan rekaman satu rangkap diberikan ke dinas PUPRPKPP Provinsi. Kemudia dokumen RKK ini diverifikasi setelah adanya keputusan kadis tentang penetapan penerima bantuan rumah layak huni bantuan khusus pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota.

Setelah keluarnya keputusan kepala dinas tentang penerima bantuan RLH kepada pemerintah kab/kota dan juga PPK sudah melakukan kontrak swakelola bersama pokmas penerima bantuan dapat memproses pengajuan dana. Pendanaan bantuan pembangunan RLH bersumber dari APBD. Setelah pokmas menandatangani kontrak dan sudah disetujui oleh kadis/perangkat daerah maka pencairan dana dapat dilakukan. Pencairan dilakukan dengan mentransfer bank kepada rekening kelompok masyarakat.

Dari banyaknya rumah yang dibantu oleh pemerintah ternyata masih adanya masyarakat yang akan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan keuangan rumah layak huni ini masih terkendala dengan persyaratan yang ada, seperti surat menyurat dimana rumah belum atas nama kepala keluarga atau anggota keluarga. Kemudian, untuk pengadaan barang dikarenakan adanya kenaikan harga membuat bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang sebelumnya serta anggaran dana dibutuhkan untuk rumah yang membutuhkan dana lebih tanpa mengurangi item-item yang sudah ada. Dan pelaksanaan pembangunan melebihi target waktu yang ditentukan.

2. METODE PENELITIAN

Dari banyaknya rumah yang dibantu oleh pemerintah ternyata masih adanya masyarakat yang akan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan keuangan rumah layak huni ini masih terkendala dengan persyaratan yang ada, seperti surat menyurat dimana rumah belum atas nama kepala keluarga atau anggota keluarga. Kemudian, untuk pengadaan barang dikarenakan adanya kenaikan harga membuat bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang sebelumnya serta anggaran dana dibutuhkan untuk rumah yang membutuhkan dana lebih tanpa mengurangi item-item yang sudah ada. Dan pelaksanaan pembangunan melebihi target waktu yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, indikator wawancara telah diklarifikasikan. Peneliti mempertanyakan hal-hal lain yang menyangkut dengan indikator lainnya. Untuk dapat membahas tiga indikator diatas yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu implementasi program rumah sederhana layak huni di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menguraikan hasil wawancara yang didapatkan dari para informan mengenai implementasi program rumah sederhana layak huni di Kota Pekanbaru.

1. Pengorganisasian

indikator pengorganisasian yaitu dalam struktur pelaksanaannya dan koordinasi yang dilakukan antar pihak sudah cukup optimal. Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugasnya memudahkan para pihak yang terlibat mengetahui tugas dan fungsinya didalam kerberlangsungan berjalannya program rumah layak huni ini. Koordinasi yang dilakukan antar pihak juga terjalin dengan cukup bagus. Namun, masih ada yang menjadi permasalahan didalam berjalannya program rumah layak huni ini yaitu masih ada anggota yang kurang ikut andil dalam menjalankan program ini selain itu adanya kesalahpahaman antar pihak, hal ini

dikarenakan adanya suatu permasalahan dari satu pihak tetapi tidak diketahui alasannya kepada pihak yang lain sehingga mengakibatkan adanya miskomunikasi. Hal inilah yang membuat indikator pengorganisasian dalam pelaksanaan program rumah layak huni ini masih cukup optimal.

2. Interpretasi

indikator interpretasi yaitu dalam pelaksanaan prosedur atau petunjuk teknis, dan kinerja dari para pelaksana masih kurang optimal. Untuk petunjuk teknis selama berlangsungnya program rumah layak huni ini sudah dilaksanakan sudah cukup sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dikarenakan petunjuk teknis merupakan acuan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni ini. Sedangkan mengenai kinerja dari para pelaksana masih kurang. Hal ini dikarenakan Sebelum dijalankan proses pembangunan ada kesepakatan antar pihak ketua LPM/Pokmas dengan Dinas Perkim, akan tetapi dari ketua LPM itu sendiri tidak menjalankan sesuai dengan kesepakatan tersebut. Selain itu, adanya kelalaian dari pihak yang terlibat sehingga menghambat keberlangsungan proses pembangunan Rumah Layak Huni ini.

3. Penerapan

Indikator penerapan dalam program rumah layak huni belum cukup optimal. Bisa dilihat dari anggaran yang sudah ditetapkan yaitu Rp. 60.000.000; per unit itu tidak cukup apabila bagi penerima yang rumahnya berada ditanah rawah. Hal ini dikarenakan membutuhkan dana yang lebih untuk menimbun. Apalagi jika tidak ada swadaya dari masyarakat. Sehingga rumah yang sudah dibangun misalnya ditanah rawah akan berbeda hasilnya dengan rumah yang berada di posisi tinggi. Karena adanya kekurangan dan dan tidak ada swadaya masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat. masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program rumah layak huni. Sedangkan masyarakat yang menerima bantuan tersebut baru tahu hanya ketika RT turun kelapangan untuk survey yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. terkait target waktu yang sudah ditentukan juga melebihi batas waktu yang disebabkan oleh terlambatnya pencairan, kurangnya bahan, bahkan keadaan cuaca juga mempengaruhi proses pembangunan rumah tersebut.

2.FAKTOR PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA PEKANBARU

surat menyurat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah bisa menghambat pelaksanaan program rumah layak huni. Masih banyak masyarakat yang mau mengikuti program rumah layak huni terkendala sama surat kepemilikan tanahnya. Kebanyakan rumahnya bukan nama yang bersangkutan bahkan masih nama yang lama. Jika dilihat dari kondisi rumahnya masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan bantuan program tersebut. akan tetapi karena terkendala surat tanah membuat mereka tidak bisa mendapatkannya.

KESIMPULAN

1. Implementasi kegiatan rehabilitasi rumah layak huni dinilai belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, pertama pengorganisasian dimana dalam hal ini terjadi kesalahpahaman antar pihak karena kurangnya koordinasi. Kedua, indikator interpretasi dimana masih belum optimalnya kinerja dari pihak yang terlibat dan masih ada kelalaian juga. Ketiga, indikator penerapan yang dimana adanya keterlambatan

pencairan dana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pembangunan yang melebihi target waktu yang sudah ditetapkan.

2. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Pekanbaru, diantaranya pertama kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kedua anggaran dana yang diberikan kurang, dan ketiga terkendala dalam dokumen kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.s

Arif, Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Arikunto. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kelima*. Rineka Cipta : Jakarta.

Daniel, Moehar .2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : Bumi Aksara

Farida, Rahim.2008. *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Bumi Aksara : Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Bumi Aksara : Jakarta.

Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Siagian, Sondang P, 2004, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

_____.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung.

_____(2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta cv. Stuart, H. (1980). *Encsoding/Decoding*. In D.H Stuart Hall (Ed.), *Culture, Media, Language*.

Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*.

Syukur. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI

Westra. 1989. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Persindo.

Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

_____.2016. *Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)

Jurnal:

- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34-45
- Irfan, M. (2017). Kebijakan Rumah Layak Huni Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-8..
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744-754.
- Putra, Restu. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP*. Vol. 6. Edisi 1.

Skripsi dan Tesis

- Alfaki Muqaddam, S. A. I. D. (2018). Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Dan Perbaikan Rumah Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Administrasi).
- Hasibuan, L. H. (2021). Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru Tahun 2020 Skripsi (Doctoral dissertation, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Islami, M. (2017). Impelementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp)(Studi Kasus Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Limau Manis Dan Rumbio Kecamatan Kampar) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pangestu, A., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2022). Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau Universitas Islam Riau.
- Safii, S., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 165-175.
- Serang, R. D. I. K. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
- Aprianto, Kholik. (18 Desember 2022). Dinas Perkim Dorong Pembangunan RLH bagi Masyarakat Miskin di Pekanbaru. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/83569/2022/04/13/dinas-perkim-dorong-pembangunan-rlh-bagi-masyarakat-miskin-di-pekanbaru#sthash.jbl60be6.sVBXF9Lx.dpbs>. (13 April 2022).
- Suryana, Siti Erna Latifi. 2009. Implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di kabupaten aceh tamiang. Tesis. Universitas lampung : Bandar Lampung.

Website:

- Aprianto, Kholik. (18 Desember 2022). Dinas Perkim Dorong Pembangunan RLH bagi Masyarakat Miskin di Pekanbaru. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/83569/2022/04/13/dinas-perkim-dorong-pembangunan-rlh-bagi-masyarakat-miskin-di-pekanbaru#sthash.jbl60be6.sVBXF9Lx.dpbs>. (13 April 2022).

Adha.B.D. (18 Desember 2022). 72 Rumah Warga Miskin Pekanbaru Akan Dibedah. <https://www.antaraneews.com/berita/2893689/72-rumah-warga-miskin-pekanbaru-akan-dibedah>. (21 Mei 2022).